

Daftar Pustaka

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Social Work Journal Volume 10, Nomor 2*, 163-174.
- Ahyat, F. (2004). *Resolusi konflik antar nelayan.: Studi tentang upaya-upaya resolusi konflik oleh pemerintah Kota Bengkulu*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Banyumas: Pena Persada.
- Amir, N. (2023). *Sambut Pj Gubernur Sulsel, Kawal Pesisir Rencana Aksi Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae*. Makassar: Jejak Fakta.
- Anggriawan, R. P., Sutaryono, & Salim, M. N. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, Volume 1, Nomor (1)*, 29-41.
- Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Civil Society, Vol. 3, No. 2*, 117-127.
- Aripin, N. A. (2023). *Warga Pulau Lae-lae Demo Tolak Reklamasi Jelang Akhir Jabatan Andi Sudirman*. Makassar: Detik Sulsel.
- Aspan, Z. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa*, 19-24.
- Aswandi, K. (2019). Silang sengkarut pembangunan berkelanjutan perkotaan dalam pusaran kapital (Studi kasus: Megaprojek reklamasi CPI Makassar). *EcceS (Economics, Social, and Development Studies), Volume 6, No. 1*, 1-17.

- Aswar, M. (2023). *Reklamasi Pesisir Makassar Berlanjut, Pulau Lae-lae jadi Sasaran*. Makassar: Makassar Rakyat News.
- AU, A. N., Fitrianti, A. N., & Yusuf, M. (2023). Analisis Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 Nomor 1*, 2-8.
- Awi, M. (2023). *Warga Pulau Lae-lae Diminta Sampaikan Alasan Penolakan Sebelum Reklamasi Dilakukan*. Makassar: Ini Kata.
- Bau, A. D. (2023, September 10). Kebijakan Reklamasi CPI di Pulau Lae-Lae. (D. G. Pertiwi, Interviewer)
- Chandra, W. (2023). *Reklamasi Pulau Lae-Lae dan Gugatan Ruang Hidup Warganya*. Makassar: Mongabay.
- Chandra, W. (2023). *Sambut Penjabat Gubernur Sulsel Baru, Warga Pulau Lae-Lae Tegaskan Tolak Reklamasi*. Makassar: Mongabay.
- Chandra, W. (2023). *Warga Pulau Lae-lae Gelar Ritual Songkabala, Tolak Bala Tolak Reklamasi*. Makassar: Mongabay.
- Conyers, D. (1986). Decentralisation and Development: A Framework for Analysis. *Oxford Journals*, 88-100.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approach*. London: Sage Publication.
- Creswell, J., Hanson, W., Clark Plano, V., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The counseling psychologist, Volume 35 (2)*, 236-264.
- Dani, A. U. (2023). *Warga Pulau Lae-lae Desak Pemprov Sulsel Tak Terbitkan Amdal Reklamasi*. Makassar: Detik Sulsel.
- Darmansyah, A. (2019). Perubahan Permukiman Nelayan Pasca Reklamasi Pantai di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Makassar. *Jurnal Tekno Sains, Volume 8, Nomor 2*, 93-170.

- Dawi, K., Wagner, I., Yulastiani, A., Loin, R., & Pratama, E. A. (2021). Problematika Advokasi Kebijakan Publik Oleh Kelompok Masyarakat Sipil Di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor (2)*, 168-188.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2, Nomor (6)*, 744-756.
- Fatir, M. D. (2023). *DPRD Sulsel Kawal Aspirasi Warga Lae-Lae Tolak Reklamasi*. Makassar: Antara News.
- Fatir, M. D. (2023). *Warga Pulau Lae-Lae Makassar Semarakkan Kemerdekaan Melalui Festival*. Makassar: Antara News Makassar.
- Fisher, S. (2000). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. London: Zed books.
- Haedir, M. (2023, September 19). Konflik Kebijakan Reklamasi CPI di Kota Makassar. (D. G. Pertiwi, Interviewer)
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hildayanti, A. (2022). Pengembangan Lanskap Pulau Lae-Lae Berbasis Kawasan Wisata Pantai. *JURNAL AL-HADĀRAH AL-ISLĀMIYAH*, 2-19.
- IDN Times Sulsel. (2023). *Didemo, Pemprov Sulsel Ajak Warga Pulau Lae-Lae Diskusi soal Reklamasi*. Makassar: IDN Times Sulsel.
- Idris, F. N. (2015). *Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus PT Chevron versus Warga Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Iqbal, M. (2023). *Oligarchy & Social Movement dalam Pembangunan Centrepoint of Indonesia (CPI) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ismail, M. N. (2022). *Understanding Policy Conflict: How Do Policy Content And Policy Process Shape Policy Conflict Of Law No. 11 of 2020 Concerning Cipta Kerja*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Ismail, M. N. (2022). *Understanding Policy Conflict: How Do Policy Content and Policy Process Shape Policy Conflict of Law Number 11 of 2020 Concerning Cipta Kerja*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Japar, J. M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, Nomor 2*, 205-215.
- Kamal, B. (2017). Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar dalam Pembangunan Center Point of Indonesia. *Polit J Magister Ilmu Polit Univ Hasanuddin, 3(2)*, 83-93.
- Kamarudiin, Cangara, H., & Akbar, M. (2014). Opini Tokoh Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Center Point of Indonesia (CPI). *Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 3 No. 1*, 30-38.
- Kompas.com. (2016, Juli 28). *Gugatan Reklamasi Pantai Losari Ditolak, Warga Nelayan Marah dan Berteriak*. Retrieved from Kompas.com News: <https://regional.kompas.com/read/2016/07/28/15575691/gugatan.reklamasi.pantai.losari.ditolak.warga.nelayan.marah.dan.berteriak>
- Lallo, R. (2023). *Warga Kukuh Tolak Reklamasi Lae-lae*. Makassar: Rakyat Sulsel Fajar.
- Lesang, I., & Zuly Qodir. (2014). Konflik Agraria Di Kabupaten Pulau Morotai (Studi Peran Pemerintah Daerah Pada Konflik Pertanahan di Masyarakat). *Journal of Governance and Public Policy, Volume 1, Nomor (3)*, 1-11.
- Lesmana, D., Afifuddin, M., Adriyanto, A., & Sutanto, R. (2023). RESOLUSI KONFLIK SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MALUKU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10, No. 3*, 1017-1030.
- M, D. Y. (2023). *Desak Reklamasi Dibatalkan, Ratusan Warga Pulau Lae-lae Makassar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Provinsi*. Makassar: Kompas.
- Makmur, D. S. (2023). NILAI PENTING SITUS BANGKAI PESAWAT LOCKHEED P-38 LIGHTNING DI PERAIRAN PULAU LAE-LAE KOTA

- MAKASSAR. *Jurnal Pusat Studi Sejarah Arkeologi dan Kebudayaan (PUSAKA)*, Volume 3, Nomor (1), 83-92.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 34, No. 3, 194-209.
- Muin, A. (2023). *Upaya Reklamasi Pulau Lae-Lae Ditolak, Pemprov Upayakan Pendekatan*. Makassar: IDN Times Sulsel.
- Nadhir, S. (2021). *Relasi Aktor dalam Politik Pembangunan Kota: Studi Kasus Kebijakan Program Reklamasi Pantai di Kota Makassar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, A. S. (2005). *Konflik Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Noer, M. (2023, Mei 17). *Warga Pulau Lae-lae Demo DPRD Sulsel Tolak Reklamasi*. Retrieved from tvonenews.com:
<https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/123083-warga-pulau-lae-lae-demo-dprd-sulsel-tolak-reklamasi>
- Nuna, M., Ahmad, I., Agustina, B., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2021). Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi. *Journal of Judicial Review*, Volume 23, Nomor (1), 85-96.
- Pertiwi, E. (2022). Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia. *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum DAN HAK ASASI MANUSIA*, 2-8.
- R, A., Nurpiatun, & Amelia, R. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TUN: KAJIAN KASUS PERADILAN TUN MAKASSAR NO. 11/G/LH/2016/PTUN. Mks. *Journal of State and Political Law Research*, Volume 2, Nomor (2), 78-94.
- Rahardiansah, T. (2018). *Konflik Kebijakan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta: Analisis Kebijakan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang*

- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta. *Trijurnal*, 1-5.
- Riadi, S. (2023, September 11). Konflik Reklamasi CPI di Kota Makassar. (D. G. Pertiwi, Interviewer)
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor (1)*, 77-86.
- Rizal. (2023). *Tolak Reklamasi, Warga Pulau Lae-lae Mengadu ke Komisi C DPRD Sulsel*. Makassar: Republik News.
- Ruslin, I. T. (2017). Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik, Volume 5, No. 2 Tahun 2017*, 186-197.
- Salam, P. R., Hawing, H., & Akbar, M. R. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 2 No. 2*, 95-103.
- Santoso, P., & Tapiheru, J. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada.
- Suhardi. (2021). Analysis of the Center Point of Indonesia (CPI) Reclamation Policy of Makassar City in the Environmental Political Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol. 8, No. 10*, 12-22.
- Syahril, I. (2023). *Ratusan Nelayan Gelar Aksi Parade Laut, Desak Pemerintah Batalkan Reklamasi Pulau Lae-lae*. Makassar: Portal Media.
- Syamsuddin, I., Sideng, U., Abbas, I., Zhiddiq, S., & Arfan, A. (2022). The Impact of Reclamation of the Central Point of Indonesia (CPI) Area in Makassar City on the Socioeconomic Conditions of the Community. *LaGeografia, 21(1)*, 69-79.

- Tajem, M., & Saribulan, N. (2019). Konflik Kepentingan Dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 37-55.
- Taufik. (2023, September 10). Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Reklamasi: KAWAL PESISIR. (D. G. Pertiwi, Interviewer)
- Thamrin, A. (2022). *DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN CENTER POINT OF INDONESIA TERHADAP LINGKUNGAN*. Makassar: UNIVERSITAS BOSOWA.
- Utama, A. (2016, Juli 28). *Hakim PTUN Tolak Gugatan Reklamasi Makassar*. Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160728134314-12-147619/hakim-ptun-tolak-gugatan-reklamasi-makassar>
- Wahyudi, W. (2021). *TEORI KONFLIK DAN PENERAPANNYA PADA ILMU-ILMU SOSIAL*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Walinegoro, B. G., & Fitriyono, J. (2022). Policy Conflict: A Conflict Analysis of the Relocation of Street Vendors Policy in Simpang Lima, Pati Regency. *PCD Journal Vol 10 No. 2*, 57-82.
- Weible, C. M., & Heikkila, T. (2017). Policy Conflict Framework. *Policy Sci*, 2-16.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yahya, D. (2023). *Tolak Reklamasi, Ratusan Warga Pulau Lae-lae Parade Perahu*. Makassar: Celebes Media .
- Yunita, A. (2023, Oktober 23). Kebijakan Reklamasi CPI di Kota Makassar. (D. G. Pertiwi, Interviewer)